

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu (Sukirno, 2006). Pengelolaan kinerja keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang tingkat ekonominya baik dan mampu mengembangkan kekuatan ekonominya atau menjadi lemah tergantung pada cara mengelola kinerja keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif, atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dibutuhkan sumberdaya manusia, tetapi dibutuhkan juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang diselenggarakan dalam suatu anggaran pemerintahan daerah.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintah dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang, misalnya meningkatkan keamanan, ketenagakerjaan,

pendidikan, sosial dan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan yang mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Di samping sebagai strategi untuk menghadapi era globalisasi, otonomi daerah merupakan tuntutan masyarakat daerah sebagai reaksi atas ketidakadilan ekonomi yang mereka terima selama ini. Pemberian otonomi secara luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, serta potensi keanekaragaman daerah, secara nyata diharapkan bahaya disintegrasi yang selama ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diminimalkan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi daerah kabupaten dan kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah itu sendiri.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil analisis terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002).

Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen yang utama bagi kebijakan pemerintah daerah. Anggaran daerah menempati posisi paling sentral dalam upaya mengembangkan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintahan daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk meningkatkan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan serta ukuran standar bagi evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan yang menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dalam anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi (Halim, 2007). Bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka presentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangun juga tinggi, begitu pula sebaliknya (Florida, 2006). Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan

berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Halim, 2007), dan rasio pertumbuhan pendapatan berfungsi dalam mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan serta meningkatkan keberhasilannya dari tahun ke tahun (Halim, 2007).

Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Hamzah (2008) menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja keuangan pada masing-masing daerah yang berbeda. Perbedaan kinerja disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam meningkatkan potensi pendapatan daerahnya. Dengan demikian, maka secara otomatis telah terjadi perbedaan kemampuan ekonomi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Sularso dan Restianto (2011) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini memiliki rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Adanya rasio-rasio tersebut digunakan agar dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk menguji secara langsung pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, menguji secara langsung pengaruh kinerja keuangan

terhadap kemiskinan dan pengangguran serta menguji secara tidak langsung pengaruh kinerja keuangan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan latar belakang dan uraian ini, penulis mengambil judul. Penelitian ini merupakan replika dari Ni luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B Dwirandra (2007) dengan judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN KABUPATEN DAN KOTA PERIODE 2008-2013” (Studi Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewah Yogyakarta)**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jangka periode penelitian sampel dari tahun 2008 – 2013, dan juga menurunkan populasi sampel menjadi Kota dan kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terlihat fokus, maka dikemukakan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota/kabupaten di Yogyakarta beserta realisasinya, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pada kota/kabupaten di propinsi Yogyakarta.
2. Penelitian ini menggunakan periode 2008-2013.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada urain latar belakang di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio kemandirian secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah rasio kemandirian secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pengangguran?
3. Apakah rasio kemandirian secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan?
4. Apakah rasio efektifitas secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?
5. Apakah rasio efektifitas secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pengangguran?
6. Apakah rasio efektifitas secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan?
7. Apakah rasio efisiensi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?
8. Apakah rasio efisiensi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pengangguran?
9. Apakah rasio efisiensi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan?
10. Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pengangguran?
11. Apakah pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan?

12. Apakah pengangguran secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap pengangguran.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio kemandirian terhadap kemiskinan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efektifitas terhadap pengangguran.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efektifitas terhadap kemiskinan.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.
8. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efisiensi terhadap pengangguran.
9. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh rasio efisiensi terhadap kemiskinan.

10. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran.
11. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
12. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan masukan dan menambah wawasan terhadap pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang, untuk memperhatikan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan.
 - b. Menjelaskan fungsi kepada kepala-kepala SKPD di daerah untuk memperhatikan faktor-faktor yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya, misalnya pendapatan daerah yang besar, tetapi daerah dan masyarakatnya tidak mendapatkan pelayanan dan kesejahteraan yang tidak sesuai dengan pendapatan daerahnya.
2. Manfaat Praktis

Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah misalnya, Gubernur/walikota maupun bupati. Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai suatu acuan untuk memperbaiki kinerja SKPD

yang ada di daerah, bisah lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang di pimpinnya.